

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2016-2021

| No   | Sasaran Strategis                | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan                                 |  |  | Sumber Data   | Penanggung Jawab      |                  |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|-----------------------|------------------|
|  |                                  |                         | Makna Indikator                            | Alasan Pemilihan Indikator   | Cara Perhitungan Indikator   |   |                       |                  |
| MISI I :   |                                  |                         |  |  |  |   |                       |                  |
| MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN |                                  |                         |  |  |  |   |                       |                  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1                       | Angka Rata-Rata Lama Sekolah               | rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.   | Untuk meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dsb.                               | variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan   | Dinas Pendidikan, BPS | Dinas Pendidikan |
|  |                                  | 2                       | Angka Harapan Lama Sekolah                 | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.  | Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak                                 | $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan:<br>$HLS_a^t$ : Harapan Lama Sekolah pada umur $a$ di tahun $t$<br>$E_i^t$ : Jumlah penduduk usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$<br>$P_i^t$ : Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>$i$ : Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ )<br>$FK$ : Faktor koreksi pesantren | Dinas Pendidikan, BPS | Dinas Pendidikan |
| 2  | Meningkatnya kualitas kesehatan  | 3                       | Usia Harapan Hidup                         | Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.  | Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.                                      | Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur, yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahap-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.   | Dinas Kesehatan       | Dinas Kesehatan  |
|  |                                  | 4                       | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran) | Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll | Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer). | $AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000$ $D_{hamil} : \text{Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran}$ $JLH : \text{Jumlah Kelahiran Hidup}$   | Dinas Kesehatan       | Dinas Kesehatan  |
|  |                                  | 5                       | Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)   | Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).  | Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.   | $AKB = \frac{\sum K_{0-1th}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1000$ Dimana,<br>$K_{0-1th} = \text{Kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun}$   | Dinas Kesehatan       | Dinas Kesehatan  |
|  |                                  | 6                       | Prevalensi Kekurangan Gizi                 | Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, dan marasmus-kwasiorkor)    | Balita gizi kurang adalah balita yang hasil penimbangannya berada di bawah garis merah pada kartu menuju sehat (KMS)   | Jumlah Balita dengan status gizi kurang/buruk x 100%  | Dinas Kesehatan       | Dinas Kesehatan  |

| MISI II :  |   |    |  |  |   |  |                          |                        |
|--|---|----|--|--|---|--|--------------------------|------------------------|
| MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN             |   |    |  |  |   |  |                          |                        |
| 3  | Meningkatnya investasi daerah   | 9  | Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp)                          | Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)  | Untuk Mengetahui capaian kerja kinerja pertahun   | Jumlah nilai investasi (Rp)  | Penanaman Modal          | KP2TPM                 |
|  |   | 10 | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN    | Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)  | Untuk Mengetahui persentase capaian kerja kinerja pertahun  | Realisasi Investasi x 5%   | Penanaman Modal          | KP2TPM                 |
| 4  | Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah                                     | 13 | Persentase Koperasi Aktif                                  | Koperasi yg aktif dalam melakukan kegiatan usaha   | Karena dengan bertambahnya aset menggambarkan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha   | Dari laporan RAT koperasi  | Bidang Koperasi dan UK/M | Diskoperind            |
|  |   | 12 | Persentase rata - rata peningkatan aset Koperasi per tahun | Harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi   | Untuk meningkatkan aset koperasi  | Jumlah agregat nilai koperasi pada tahun N - Nilai aset pada tahun N-1 dibagi Jumlah nilai aset tahun N-1 x 100%   | Bidang Koperasi dan UK/M | Diskoperind            |
| 4  |   | 11 | Persentase pertumbuhan IKM                                 | IKM yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan sumber daya alam  | IKM yang memiliki kompetensi inti daerah sebagai salah satu syarat menghasilkan produk unggulan daerah  | Jumlah produk IKM th N (yg di fasilitas)   | Bidang Perindustrian     | Diskoperind            |
| 5  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat  | 14 | Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun)              | Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. | Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.000 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari              | Persentase Peningkatan skor PPH Ketersediaan   | Ketapang                 | Ketapang               |
|  |   | 15 | Tingkat Konsumsi Pangan Utama (kg/kapita/tahun)            | Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;   | Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari              | Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi   | Ketapang                 | Ketapang               |
| 6  | Menurunnya angka pengangguran terbuka   | 7  | Tingkat pengangguran terbuka                               | Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran  | Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja                    | Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja x 100%   | Disnakertran, BPS        | Dinsosnakertran        |
| 7  | Menciptakan hubungan industrial yang harmonis   | 8  | Prosentase perselisihan hubungan industrial                | Melindungi Hak-hak tenaga kerja yang bekerja   | Terlindunginya hak-hak tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan  | Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang tercatat x 100%   | Disnakertran, BPS        | Dinsosnakertran        |
| MISI III :   |   |    |  |  |   |  |                          |                        |
| MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN |   |    |  |  |   |  |                          |                        |
| 8  | Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dan komunikasi   | 16 | Persentase jalan dalam kondisi baik                        | Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten  | Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan  | $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$  | Dinas PUPR               | Bidang Binamarga       |
|  |   | 17 | Persentase konektivitas wilayah                            | Meningkatkan konektivitas wilayah antara pusat kegiatan dan pusat produksi   | Melakukan pembangunan/penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang belum terhubung dengan jaringan jalan | $\frac{\text{Panjang jalan penghubung pusat2 kegiatan dan pusat produksi}}{\text{Target keseluruhan panjang pusat2 kegiatan dan pusat produksi}} \times 100\%$                                       | Dinas PUPR               | Bidang Binamarga       |
|  |   | 18 | Persentase jembatan dalam kondisi baik                     | Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten  | Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan  | $\frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jembatan kabupaten}} \times 100\%$  | Dinas PUPR               | Bidang Binamarga       |
| 9  | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih | 19 | Persentase kinerja sistem irigasi                          | Pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi   | Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi  | $\frac{\text{Ketersediaan air irigasi} \frac{1}{\text{det}} \text{ pada setiap musim tanam}}{\text{Kebutuhan air irigasi} \frac{1}{\text{det}} \text{ berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$ | Dinas PUPR               | Bidang Sumber Daya Air |
|  |   | 20 | Persentase penanganan daya rusak air                       | Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air   | Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air          | $\frac{\text{Jumlah panjang sungai rawan bencana yang tertangani}}{\text{Total panjang sungai rawan bencana}} \times 100\%$  | Dinas PUPR               | Bidang Sumber Daya Air |

|    |  |    |   |  |  |   |            |                    |
|----|--|----|---|--|--|---|------------|--------------------|
| 10 | Meningkatnya prasarana dan sarana perumahan dan fasilitas umum   | 21 | Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman          | Meningkatkan kualitas layanan air minum                          | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum                                       | $\frac{\text{Masyarakat yang terlayani (jawa)}}{\text{Total masyarakat di seluruh kabupaten (jawa)}} \times 100\%$  | Dinas PUPR | Bidang Cipta Karya |
|    |  | 22 | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | Meningkatkan kualitas pelayanan air limbah                       | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sistem air limbah                               | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh kabupaten}} \times 100\%$                                     | Dinas PUPR | Bidang Cipta Karya |
|    |  | 23 | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase       | Meningkatkan kualitas drainase permukiman                        | Meningkatkan pelayanan infrastruktur drainase  | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase}}{\text{Total jumlah penduduk kawasan perkotaan}} \times 100\%$                                     | Dinas PUPR | Bidang Cipta Karya |
|    |  | 24 | Persentase rumah layak huni                                       | Peningkatan rumah layak huni                                     | Untuk meningkatkan jumlah layak huni dengan kegiatan bedah rumah                                 | $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah rumah seluruhnya}} \times 100 \%$   | Perkim     | Perkim             |
| 11 | Tersedianya prasarana fasilitas publik yang memadai              | 25 | Persentase bangunan publik yang layak pakai                       | Meningkatkan ketersediaan fasilitas publik bagi warga masyarakat | Meningkatkan kualitas bangunan publik yang sesuai standar  | $\frac{\text{Jumlah bangunan publik yang layak pakai}}{\text{Total kebutuhan bangunan publik}} \times 100\%$  | Dinas PUPR | Bidang Cipta Karya |
| 12 | Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan | 26 | Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah       | Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang               | Percepatan penyelesaian norma, standar, prosedur dan kriteria tentang rencana tata ruang wilayah | $\frac{\text{Jumlah peta analog/digital rencana tata ruang yang tersedia}}{\text{Total peta analog/digital rencana tata ruang yang harus tersedia}} \times 100\%$ | Dinas PUPR | Bidang Tata Ruang  |
|    |  | 27 | Persentase tersedianya luasan RTH                                 | Meningkatkan ketersediaan RTH                                    | Penyediaan dan pembangunan RTH publik  | $\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya pada perkotaan}} \times 100\%$   | Dinas PUPR | Bidang Tata Ruang  |

**MISI IV :**

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL**

|    |   |    |  |  |  |  |           |           |
|----|---|----|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 10 | Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian | 28 | Produksi Tanaman Pangan (ton)              | Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai  | Mendukung swasembada pangan nasional   | Jumlah produksi padi, jagung dan kedelai per tahun (ton) | Pertanian | Pertanian |
|    |   | 29 | Produksi Hortikultura (ton/Ha)             | Peningkatan produksi sayuran dan biofarma  | Penyesuaian program dengan kementerian dan dinas propinsi  | Jumlah produksi sayuran dan biofarma per tahun (ton)     | Pertanian | Pertanian |
|    |   |    |  | Peningkatan produksi buah dan tanaman hias   | Produk unggulan daerah   | Jumlah produksi buah dan tanaman hias per tahun (ton)    | Pertanian | Pertanian |
|    |   | 30 | Swasembada daging (Kg)                     | Jumlah produksi daging terhadap kebutuhan masyarakat   | Untuk mengetahui ketersediaan, kebutuhan dan kecukupan protein hewani masyarakat                 | Kebutuhan Kg per kapita per tahun                        | Pertanian | Pertanian |
|    |   | 31 | Produksi Perkebunan (Ton)                  | Peningkatan hasil produksi perkebunan  | Luas lahan perkebunan hampir 30% dari luas kabupaten Balangan dan merupakan sentra kawasan karet | Jumlah produksi per tahun (ton)                          | Pertanian | Pertanian |
| 11 | Pemanfaatan sumber daya alam bidang perikanan | 32 | Produksi Ikan (ton/tahun)                  | Jumlah semua hasil budidaya dan penangkapan ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan dan ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam satuan ton | Untuk peningkatan budidaya dan produksi perikanan  |  |           | Perikanan |
|    |   | 33 | Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun) |  |  |  |           | Perikanan |
|    |   | 34 | Luas kawasan perikanan Lestari (ha)        |  |  |  |           |           |

|    |   |    |  |  |  |  |               |               |
|----|---|----|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 12 | Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata  | 35 | Jumlah kunjungan wisata  | Potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata  | Daya tarik tujuan wisatawan  | $(\text{Jumlah kunjungan tahun } N-1) / (\text{Jumlah kunjungan tahun } N) \times 100\%$ | Pariwisata    | Pariwisata    |
| 13 | Meningkatnya luas kawasan produktif transmigrasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat | 36 | Prosentase luas kawasan transmigrasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat | Dengan bertambahnya luas kawasan produktif transmigrasi maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrasi | Semakin luas kawasan produktif yang dikelola oleh transmigran akan menambah pendapatan masyarakat transmigrasi dan PAD dari sektor pertanian juga akan meningkat | Luas lahan produktif yang telah dibuka / Luas kawasan transmigrasi $\times 100\%$        | Disnakertrans | Disnakertrans |

**MISI V :**

**MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN**

|    |   |    |   |  |  |  |            |         |
|----|---|----|---|--|--|--|------------|---------|
| 14 | Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                       | 37 | Prosentase Angka PMKS                                       | Mengindikasi jumlah PMKS tiap tahun  | Angka merupakan indikator yang jelas untuk menunjukan data / jumlah PMKS pada tahun n  | $\text{Angka PMKS} = (\Sigma \text{PMKS Tahun } (n-1) - \Sigma \text{PMKS tahun } (n)) \times 100\%$   | Dinsos     | Dinsos  |
| 15 | Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama | 38 | Persentase penanganan konflik sosial                        | Kemajemukan masyarakat yang ada cenderung berpotensi terjadinya konflik sosial.  | Dengan ditanganinya konflik sosial yang terjadi maka diharapkan dapat mewujudkan ketentraman sosial di masyarakat                    | $(\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani} / \text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}) \times 100\%$   | Kesbang    | Kesbang |
| 16 | Tewujudnya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana                        | 39 | Rasio kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana | Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana | Rendahnya kapasitas masyarakat tentang kebencanaan   | Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan yang dibina / Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana $\times 100\%$ | BPBD       | BPBD    |
| 17 | Terwujudnya penanganan darurat bencana  | 40 | Persentase penanganan bencana                               | penanganan kedaruratan bencana yang efektif  | Kewajiban penanganan bencana   | Jumlah bencana yang ditangani / Jumlah kejadian bencana $\times 100\%$   | BPBD       | BPBD    |
| 18 | Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik                 | 41 | Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi         | Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel  | Untuk pemulihan pasca bencana  | Jumlah objek terdampak yang ditangani / Jumlah keseluruhan terdampak $\times 100\%$  | BPBD       | BPBD    |
| 19 | Meningkatkan pembinaan kepemudaan   | 42 | Jlh organisasi kepemudaan yang aktif                        | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan seperti karang taruna, Pramuka, dan lainnya                     | Untuk menggalakkan kegiatan kepemudaan dan olahraga bagi para pemuda dalam rangka menyalurkan kegiatan secara positif dan bermanfaat | Jlh organisasi kepemudaan aktif yang dibina / jml organisasi kepemudaan di Kab. Balangan $\times 100\%$  | Kepemudaan | Dispora |
| 20 | Meningkatkan pembinaan olahraga   | 43 | Jlh cabang olahraga berprestasi                             | Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan balangan dalam pekan olahaga daerah  |  | Jlh cabang olahraga prestasi di event prov atau nasional/jmh cabang prestasi $\times 100\%$  | Olahraga   | Dispora |

**MISI VI :**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH**

|    |  |    |   |   |   |   |         |         |
|----|--|----|---|---|---|---|---------|---------|
| 21 | Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat | 44 | Persentase jaringan dan infrastruktur e-government  | Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government   | Untuk meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online | Jumlah penerapan egovernment/aplikasi pemerintah $\times 100\%$   | Kominfo | Kominfo |
|    |  | 45 | Persentase diseminasi dan pendistribusian informasi | Mengintegrasikan semua layanan on line SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan | Untuk meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online | Jumlah Layanan Informasi Publik berbasis IT yang dihimpun dibagi dengan jumlah layanan informasi publik Daerah dikali 100 % | Kominfo | Kominfo |

|   |  |  |  |  |   |  |                   |                                      |
|---|--|--|--|--|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| 22  | Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah  | 46   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (%) | Penilaian terhadap pelayanan publik menyangkut segala aspek mencakup sistem, prosedur dan metode dalam memenuhi hak-hak publik, baik sebagai penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik.   | Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. | Pengolahan data nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Karena itu untuk pengolahan data dilakukan dengan cara:<br>a. Membuat scoring/nilai persepsi untuk setiap alternatif jawaban (x) sebagai berikut : alternatif jawaban 'a' diberi nilai 1, 'b' diberi nilai 2, 'c' diberi nilai 3 dan 'd' diberi nilai '4'.<br>b. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :<br>Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot = 1 = 0,071 jumlah unsur 14<br>c. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :<br>IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang<br>Total Unsur yang terisi<br>d. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :<br>IKM Unit Pelayanan X 25 | SKPD Pelayanan    | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
|   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah   | 49   | Opini BPK atas LKPD  | Opini wajar tanpa pengecualian (WTP = unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (WDP = qualified opinion), menolak memberikan opini (disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opinion).   | Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.  | Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan rumus : ( Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan ) / ( Jumlah Total Rekomendasi BPK RI ) X 100%   | Inspektorat       | Inspektorat                          |
|   |  | 50   | Nilai EKPPD Kabupaten  | suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.  | Untuk mengetahui mengukur, menilai dan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.   | Nilai EKPPD (Kemendagri)   | Bag. Pemerintahan | Setda                                |
| 51  | Nilai HE-SAKIP Kabupaten   | Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. | Untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)              | HE-AKIP Kabupaten dari Kemapan RB  | Bag. Organisasi   | Setda  |                   |                                      |
| <b>MISI VII :</b>   |  |  |  |  |   |  |                   |                                      |
| <b>MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF</b> |  |  |  |  |   |  |                   |                                      |
| 24  | Menurunnya angka pelanggaran ketertiban masyarakat   | 52   | Angka pelanggaran Peraturan Daerah   | Menegakan peraturan daerah   | Untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ("Perda") dan/atau peraturan kepala daerah.   | Jumlah pelanggaran perda = 0   | Satpol PP         | Satpol PP                            |
| 25  | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK | 53   | Cakupan kepemilikan dokumen penduduk   | Rata-rata prosentase pelayanan dokumen kependudukan yang meliputi prosentase kepemilikan kartu keluarga, prosentase kepemilikan KTP-el, prosentase kepemilikan akta kelahiran, prosentase kepemilikan akta kematian dan prosentase kepemilikan akta perkawinan | Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk  | Jumlah prosentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan  | DUKCATPIL         | DUKCATPIL                            |